



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 November 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 43/SE/2023

TENTANG

**KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG/JASA
SEBAGAI PENUNJANG PENINGKATAN NILAI INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan upaya meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut:

1. Dalam proses pengajuan pembayaran untuk belanja pengadaan barang/jasa dengan pengadaan langsung/penunjukan langsung/tender cepat/tender/seleksi, PPTK menyampaikan dokumen kelengkapan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. tangkapan layar Berita Acara Serah Terima (BAST) pada aplikasi E-Katalog/SPSE kecuali untuk pengadaan barang/jasa melalui toko daring dan manual; dan/atau
 - b. tangkapan layar penilaian kinerja penyedia pada aplikasi E-Katalog/SPSE apabila pekerjaan telah selesai 100% dan dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa melalui toko daring dan manual.
2. PPTK melakukan input kontrak berupa bukti pembelian/kuitansi/Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian pada aplikasi E-Katalog/SPSE dan atas bukti tangkapan layar hasil input kontrak tersebut menjadi salah satu kelengkapan dokumen yang menjadi pertanggungjawaban PPTK.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta